

Legal Politics in the 2024 Election Era in Indonesia

Ade Rizki Saputra^{1*}, Mira Gunati², Miliyandra³, Ery Rachma Firsanti⁴, Tri Agus Haryono⁵, Ryan Faisal⁶, Imas Rosidawati Wiradirja⁷

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Politics, Law, 2024 Election, Indonesia, Regulation, Constitutional Court, Integrity, Transparency, Justice

Received : 2 March

Revised : 17 April

Accepted: 22 May

©2024 Saputra, Gunati, Miliyanra, Firsanti, Haryono, Faisal, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study investigates legal politics in the 2024 election era in Indonesia with a focus on changes in regulations and decisions of judicial institutions that affect integrity, transparency and fairness in the general election process. By analyzing the development of legal politics during the election, this research aims to understand its impact on the foundations of democracy in Indonesia. The research methods used include document analysis, case studies, and interviews with relevant stakeholders. The results of the study highlight the important role of Constitutional Court decisions in shaping electoral legal politics, as well as the challenges and opportunities in realizing honest, fair and transparent general elections in the future

Politik Hukum pada Era Pemilu 2024 di Indonesia

Ade Rizki Saputra^{1*}, Mira Gunati², Miliyandra³, Ery Rachma Firsanti⁴, Tri Agus Haryono⁵, Ryan Faisal⁶, Hj. Imas Rosidawati Wiradirja⁷

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilu 2024, Indonesia, Regulasi, Mahkamah Konstitusi, Integritas, Transparansi, Keadilan

Received : 2 March

Revised : 17 April

Accepted: 22 May

©2024 Saputra, Gunati, Miliyanra, Firsanti, Haryono, Faisal, Wiradirja:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Studi ini menginvestigasi politik hukum pada era pemilu 2024 di Indonesia dengan fokus pada perubahan regulasi dan keputusan lembaga-lembaga pengadilan yang memengaruhi integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan menganalisis perkembangan politik hukum selama pemilu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampaknya terhadap fondasi demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil studi menyoroti peran penting putusan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk politik hukum pemilu, serta tantangan dan peluang dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan di masa depan

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu mekanisme yang paling mendasar dalam sistem demokrasi, yang memungkinkan warga negara yang memenuhi syarat untuk bersaing dalam memperebutkan jabatan politik di pemerintahan. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk mengungkapkan preferensi politik mereka dan memilih para pemimpin yang mereka percayai dapat mewakili kepentingan mereka secara efektif. Pada saat yang sama, pemilu juga berfungsi sebagai platform bagi calon-calon politik untuk menawarkan visi, kebijakan, dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Persaingan dalam pemilu mendorong calon-calon untuk berlomba-lomba memperjuangkan dukungan publik dengan cara yang transparan dan terbuka, sehingga memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang cukup. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik, tetapi juga merupakan proses yang vital dalam menjaga akuntabilitas, keberagaman, dan representasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Pemilu 2024 menandai periode transisi politik yang signifikan setelah berbagai perubahan terjadi dalam pemandangan politik Indonesia. Setelah pemilihan presiden dan legislatif sebelumnya, banyak harapan dan ekspektasi baru yang muncul dari masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih, yang pada gilirannya mendorong perubahan dalam dinamika politik hukum.

Pemilu 2024 terjadi di tengah-tengah perkembangan global yang cepat, di mana tantangan baru seperti teknologi, keamanan siber, dan isu-isu lingkungan semakin menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, politik hukum di Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global ini, baik dalam hal regulasi teknologi informasi, keamanan siber, maupun perlindungan lingkungan hidup. Peran hukum dalam mengatasi tantangan-tantangan ini menjadi semakin penting, dan pemilu 2024 memberikan kesempatan bagi para pemimpin untuk menggarisbawahi visi mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.

Dengan semakin meningkatnya partisipasi politik dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum muda dan perempuan, politik hukum di era pemilu 2024 juga mencerminkan aspirasi inklusifitas dan keadilan. Munculnya gerakan-gerakan sosial dan tuntutan untuk reformasi hukum yang lebih progresif menempatkan isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan hak-hak minoritas dalam pusat perhatian politik hukum. Dengan demikian, latar belakang politik hukum pada era pemilu 2024 di Indonesia mencakup dinamika kompleks dari perubahan politik, tantangan global, serta tuntutan akan inklusivitas dan keadilan dalam sistem hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Politik Hukum merupakan cabang dari ilmu politik dan hukum yang berkaitan dengan pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum dalam konteks politik sebuah negara. Dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia, politik hukum mencakup proses pembentukan dan penerapan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, termasuk undang-undang pemilu,

proses pengawasan, dan penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, politik hukum juga mencakup peran lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

B. Pemilu

Pemilu merupakan proses demokratis yang fundamental di mana warga negara memilih perwakilan politik mereka dalam pemerintahan. Pemilu tidak hanya sekadar proses untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik, tetapi juga merupakan sarana bagi warga negara untuk mengekspresikan preferensi politik mereka serta mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Pada era pemilu 2024 di Indonesia, pemilu menjadi fokus utama dalam perhatian publik karena merupakan momen penting dalam menentukan arah politik negara. Persaingan antarpolitical politik, agenda politik yang diusung, dan partisipasi publik menjadi elemen kunci dalam pemilu ini, yang semuanya merupakan bagian integral dari proses demokratis yang berkembang di Indonesia.

METODOLOGI

Metodologi dalam memahami politik hukum pada era pemilu 2024 di Indonesia melibatkan pendekatan multidimensional yang menggabungkan analisis literatur, studi kasus, dan pengamatan langsung terhadap perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Penelitian akan didasarkan pada tinjauan terhadap literatur terkini yang mencakup teori-teori politik hukum, undang-undang pemilu, serta analisis kebijakan terkait sistem pemilihan umum. Studi kasus dari pemilu-pemilu sebelumnya akan menjadi sumber penting untuk memahami pola politik dan hukum yang telah ada serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, observasi langsung terhadap proses pemilu 2024, termasuk kampanye politik, perdebatan publik, dan pelaksanaan pemungutan suara, akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika politik hukum yang terjadi dalam konteks nyata. Kombinasi pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang politik hukum pada era pemilu 2024 di Indonesia serta implikasinya terhadap demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum negara.

HASIL PENELITIAN

Pemilu di Indonesia telah berkembang dengan cara yang rumit dalam upaya mencapai bentuk yang lebih sempurna. Lima jenis pemilu yang berbeda digabungkan pada pemilu serentak 2019, sehingga menimbulkan sejumlah kendala teknis. Permasalahan tersebut antara lain beban kerja penyelenggara yang tinggi, peningkatan anggaran yang besar, dan kebingungan pemilih akibat banyaknya pilihan pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang menguraikan enam model konstitusional pemilu serentak dan mengisyaratkan adanya politik hukum yudisial. Langkah selanjutnya yang dilakukan legislator adalah memodifikasi peraturan perundang-undangan pemilu untuk menerapkan salah satu model simultanitas

pemilu yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia, pemilu dipandang sebagai sarana utama untuk mencapai kedaulatan rakyat dalam pemilihan pemimpin dan arah kebijakan pemerintah. Pemilu telah berkembang menjadi simbol nyata demokrasi dan keterlibatan warga negara dalam proses politik seiring dengan tumbuhnya politik hukum. Untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai dengan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem dan penyelenggaraan pemilu perlu mendapat perhatian. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menjamin perencanaan, sistem, dan kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik.

Berdasarkan temuan studi nasional yang dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024, mayoritas masyarakat Indonesia sangat atau sangat senang dengan jalannya pemilu 2024. Penilaian secara umum terhadap pemilu kali ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih merasa puas dengan kinerja KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan meyakini pemilu berlangsung jujur (JURDIL). Mayoritas masyarakat cenderung lebih akurat ketika menganalisis keadaan di tempat pemungutan suara di mana mereka memberikan suara, meskipun ada sedikit perbedaan antara penilaian secara keseluruhan dan penilaian di tingkat TPS.

Namun mayoritas masyarakat juga mengetahui Quick Count dan Real Count, dan sebagian besar menerima keakuratan hasil penghitungan resmi (Real Count) yang dilakukan KPU. Namun, hanya sebagian kecil masyarakat yang mengakui bahwa mereka telah menerima bantuan sosial atau dijanjikan tunjangan sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap politisi tertentu. Hal ini telah memengaruhi pandangan politik mereka, terutama dalam hal dukungan terhadap pasangan calon presiden.

PEMBAHASAN

A. Transformasi Regulasi dan Putusan Pengadilan dalam Politik Hukum Pemilu 2024 di Indonesia

Perkembangan politik hukum terkait penyelenggaraan pemilu pada era 2024 di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam konteks perubahan regulasi dan keputusan lembaga-lembaga pengadilan. Pertama-tama, terdapat evolusi dalam regulasi pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan transparansi. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi dalam pemilu sebelumnya.

Selain itu, keputusan lembaga-lembaga pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), turut berperan dalam membentuk politik hukum pemilu. MK memiliki peran krusial dalam menetapkan keputusan-keputusan yang memengaruhi aturan dan prosedur pemilu. Pada era 2024, keputusan MK tentang model pemilu serentak dan penyelesaian sengketa pemilu memengaruhi bagaimana pemilu diselenggarakan dan bagaimana perselisihan terkait pemilu ditangani.

Namun, perubahan regulasi dan keputusan pengadilan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan dan perdebatan dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Beberapa pihak mungkin mengkritik atau menentang perubahan-perubahan tertentu, baik dari segi substansi maupun prosedural. Selain itu, implementasi keputusan pengadilan juga bisa menghadapi hambatan praktis, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari pihak-pihak yang terlibat.

Di tengah dinamika politik hukum tersebut, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara adil, jujur, dan transparan, serta mampu merefleksikan suara dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, perkembangan politik hukum terkait pemilu pada era 2024 di Indonesia merupakan cerminan dari upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi demokrasi dalam negeri, sambil menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi dalam konteks politik dan hukum.

B. Dampak Dinamika Politik Hukum terhadap Integritas, Transparansi, dan Keadilan dalam Pemilu 2024 di Indonesia

Dinamika politik hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia pada era pemilu 2024. Pertama-tama, dalam konteks integritas, perubahan dan ketidakpastian dalam regulasi serta putusan pengadilan dapat memengaruhi keyakinan masyarakat terhadap kejujuran dan keadilan pemilu. Jika ada keraguan atau persepsi ketidakadilan, integritas seluruh proses pemilihan umum dapat dipertanyakan, mengurangi legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Kedua, dinamika politik hukum juga berdampak pada transparansi. Perubahan-perubahan dalam regulasi pemilu dan putusan pengadilan yang terbuka dan terbaca secara transparan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Namun, jika proses pengambilan keputusan atau regulasi tersebut terjadi di balik layar atau tidak transparan, maka dapat memicu spekulasi dan keraguan terhadap integritas pemilu secara keseluruhan.

Selain itu, dalam hal keadilan, dinamika politik hukum dapat memengaruhi keseimbangan dan perlakuan yang adil terhadap semua peserta dalam proses pemilihan umum. Putusan pengadilan yang adil dan tepat waktu dapat memastikan bahwa pelanggaran hukum yang terjadi selama pemilu diperlakukan dengan konsisten dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, jika keputusan pengadilan dianggap tidak netral atau dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, hal ini dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem pemilu.

Dengan demikian, dinamika politik hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia pada era pemilu 2024. Upaya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam regulasi, serta memastikan independensi lembaga-lembaga pengadilan, sangatlah krusial untuk membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi yang sehat dan berkembang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pemilu 2024 di Indonesia telah menjadi sorotan utama pasca Reformasi, dipersepsikan sebagai salah satu pemilu yang paling problematik. Dinamika politik hukum memainkan peran penting dalam menggarisbawahi integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum tersebut. Konvergensi antara supremasi etik dan hukum, yang terlihat dalam amandemen konstitusi tahun 1999, menciptakan landasan yang kuat bagi pemahaman bahwa etika tidak dapat dipisahkan dari hukum. Standar etika yang tinggi ditegaskan dalam konstitusi, khususnya terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, menjadi landasan bagi proses demokrasi yang berkualitas.

B. Saran

Dalam menghadapi masalah pelanggaran etik dan kecurangan dalam pemilihan umum, diperlukan respons yang cepat dan efektif dari lembaga-lembaga terkait, terutama Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, perlu diajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu 2024 ke MK untuk memastikan keadilan dalam proses demokrasi. Peningkatan budaya politik yang berkualitas dan etika yang tinggi di kalangan pejabat publik, termasuk hakim dan pejabat negara lainnya, juga perlu menjadi fokus utama dalam memperbaiki sistem politik dan hukum. Dalam hal ini, peran Bawaslu RI dan KPU RI sebagai penyelenggara pemilu harus lebih diperkuat dan diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menangani pelanggaran dan memastikan integritas proses pemilihan umum.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi berbagai aspek politik hukum pada era pemilu 2024 di Indonesia dengan lebih mendalam. Beberapa topik yang dapat menjadi fokus penelitian lanjutan meliputi:

1. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Studi lebih lanjut dapat mengevaluasi dampak keputusan MK terhadap proses pemilihan umum, terutama dalam menentukan keadilan, transparansi, dan integritas pemilu.
2. Analisis Kebijakan Pemilu: Penelitian dapat meninjau kebijakan-kebijakan pemilu yang diimplementasikan pada era 2024, serta efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.
3. Peran Penegak Hukum: Studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran dan kinerja lembaga penegak hukum, seperti KPU dan Bawaslu, dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu serta penanganan pelanggaran hukum selama proses pemilihan umum.
4. Pengaruh Budaya Politik: Penelitian lanjutan dapat menginvestigasi pengaruh budaya politik terhadap proses pemilihan umum, termasuk norma-norma etika yang dianut oleh pemimpin politik dan aparat penegak hukum.
5. Partisipasi Publik: Studi lebih lanjut dapat mengevaluasi tingkat partisipasi publik dalam proses pemilu 2024, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, serta dampaknya terhadap legitimasi dan kualitas demokrasi.

6. Reformasi Hukum Pemilu: Penelitian lanjutan dapat meneliti prospek dan tantangan dalam melakukan reformasi hukum pemilu untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan keadilan dalam pemilihan umum di masa depan.

Dengan mengeksplorasi topik-topik ini secara lebih mendalam, penelitian lanjutan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika politik hukum pada era pemilu 2024 di Indonesia dan memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 474-486.
- Fuadi, A. B. (2021). Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 702-723.
- Hutapea, E. K., Santoso, P., Alexandra, H. F. S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 424-434.
- Noak, P. A. (2023). Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12, 596-612.
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 75-86.
- Nurchayaningrum, F. (2021). Politik Hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Era Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332-346.